

ABSTRAK
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR
(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)

Oleh

Fanny Marsela Sihombing

Jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan di Indonesia wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan agar memiliki kekuatan eksekutorial, namun masih ditemukan kreditur yang melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini menganalisis tindakan PT Hasjrat Multifinance Luwuk yang menarik objek jaminan fidusia tidak terdaftar secara paksa sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang memuat jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Serta Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusi, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I adalah dengan mempertimbangan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta adanya kerugian yang timbul bagi pihak Penggugat. Majelis hakim telah mempertimbangan dan menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT
UNLAWFUL ACTS ON THE EXECUTION OF UNREGISTERED
FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS
(Study of Decision Number 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)
By

Fanny Marsela Sihombing

Fiduciary guarantees in financing practices in Indonesia must be made with a notary deed and registered in order to have executory power, but creditors are still found who unilaterally withdraw the collateral object without complying with these provisions. This study analyzes the actions of PT Hasjrat Multifinance Luwuk that withdrew the object of fiduciary guarantee from being forcibly registered as an unlawful act based on Decision Number 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.

The type of research used is descriptive normative legal research with a normative juridical approach. Secondary data is collected through literature studies and document studies, then processed through the stages of examination, marking, reconstruction, and systematization of data, and is analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the validity of the execution of the unregistered fiduciary guarantee object must pay attention to the provisions contained in Article 5 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law which contains that fiduciary guarantees must be made with a notary deed. As well as Article 29 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law, explaining that the implementation of an executory title can be carried out by referring to the provisions in Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law, further reaffirmed in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The judge's consideration in imposing a verdict on the violation of the execution of the fiduciary guarantee object committed by Defendant I is to consider related to the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 stating that against the fiduciary guarantee there is no agreement on the injury of the promise and the debtor objects to voluntarily surrendering the object that becomes a fiduciary guarantee, then all legal mechanisms and procedures in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee certificate must be carried out and applies the same as the execution of court decisions that have permanent legal force and any losses incurred for the Plaintiff. The panel of judges has considered and stated that the execution of the fiduciary guarantee object carried out by the Defendant is not procedural and is an unlawful act.

Keywords: Execution, Fiduciary, Unlawful Acts.